

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Keadilan Dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Keadilan

a. Makna dan Hakekat Keadilan

Keadilan berasal dari kata *adl* dalam bahasa Arab yang berarti keseimbangan dalam bertindak dan berperilaku. Keseimbangan ini meliputi relasi antara hak dan kewajiban serta keselarasan dalam interaksi antar sesama. Pada hakikatnya, keadilan adalah perlakuan terhadap setiap orang dengan apa yang seharusnya diterima dengan mengesampingkan kesulitan yang telah dipenuhi. Sebagai yang dijelaskan oleh Afifa Rangkuti, dalam jurnalnya tentang konsep keadilan dari perspektif Islam, menjelaskan bahwa keadilan menuntut agar setiap orang diakui dan diperlakukan dengan kesetaraan sesuai dengan martabatnya tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun di hadapan Allah SWT. (Afifa Rangkuti, konsep keadilan dalam perspektif Islam, Jurnal Pendidikan Islam, 2017, hlm 3) Manusia sebagai makhluk sosial memiliki hak yang merupakan faktor penting untuk mendukung kehidupannya dalam konteks sosial.

Setiap Sejarawan mempunyai pandangan sendiri-sendiri mengenai keadilan. Keadilan bagi W.J.S. Poerwadarmint adalah suatu keadaan yang tidak bersifat memihak, tepat, serta tidak ada

penyalahgunaan kekuasaan. Dalam buku yang ditulisnya berjudul Etika Politik, Frans Magnis Suseno menjelaskan bahwa keadilan adalah keadaan di mana setiap orang di dalam situasi yang sama harus diperlakukan sama. Aristoteles membagi keadilan kepada dua, yaitu keadilan komutatif dan keadilan distributif. Namun, gurunya yang bernama Plato memperkaya pengertian tersebut dengan menambahkan istilah keadilan legal atau keadilan moral. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, keadilan sangat penting. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak-haknya, keinginan untuk memperoleh keadilan pun semakin mendesak. Setiap orang menginginkan pengabdian dan keputusan yang adil dalam berbagai aspek kehidupan, kebijakan pemerintah serta pelayanan publik. Setiap orang mengharapkan kehidupan yang adil dan merata tanpa memandang suku, ras, atau agama.

b. Keadilan Sosial dalam Konteks Bernegara

Keadilan sosial, sebagai hal yang paling mendasar ditujukan kepada semua warga negara Indonesia. Dalam kategori hukum, prinsip seorang yang berkeadilan adalah seorang yang dalam setiap kondisi diperlakukan setara tidak membedakan kedudukan, keadaan ekonomi, atau yang lain. Sebagai gambaran umum, dikatakan tidak berkeadilan apabila ia melanggar hukum atau bertindak tidak adil kepada orang lain. Sementara itu, orang yang bersifat patuh pada peraturan dan mengedepankan sikap adil kepada orang lain bisa dikatakan sebagai

orang yang berkeadilan. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, keadilan sosial merupakan sasaran yang paling utama dan paling mendasar untuk dicapai di semua bidang, seperti kehidupan pribadi, kehidupan sosial, dan juga di bidang politik. Dalam hidup bernegara, keadilan adalah sesuatu yang tidak boleh sekedar menjadi slogan dan imajinasi, tetapi harus menjadi hal kongkrit dan dicapai.

c. Makna Keadilan dalam Kehidupan Bermasyarakat

Keadilan, selaras dengan namanya, berasal dari posisi kata “adil” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan tidak memihak, tidak berada di sisi tertentu, dan seimbang. Sementara itu, keadilan di dalam bahasa Arab adalah al-‘adl, yang berarti berdiri di tengah-tengah atau berada di dalam keadaan seimbang. Intinya, kletus dari kearifan berarti agar bisa merasakan hal tersebut, orang-orang yang berada dalam konsep tersebut harus terlebih dahulu bisa menikmatinya. Anda dapat melihat di negara-negara yang membentuk konsep ini di India, setiap orang memiliki hak untuk mengharapkan keadilan sebagai balasan kepada negara. Begitu juga negara harus memiliki tanggung jawab kepada warganya. Dengan demikian, dalam keadaan keseimbangan ini, kelompok-kelompok yang berbeda dan warga negara berbagi beban kekuasaan. Bung K kâte kade sa y k ou ya juga merujuk pada keseimbangan ideal demokrasi ini. India yang bijaksana dan seimbang adalah impian setiap orang untuk berinteraksi secara sosial, nasional, dan global.

d. Praktik dan Model Keadilan dalam Kehidupan Sehari-hari

Dalam pelaksanaannya, keadilan mencakup berbagai hubungan sosial dan aktivitas hukum yang tujuannya adalah untuk mencapai keseimbangan dalam masyarakat. Untuk kemajuan masyarakat, juga harus ada sinergi kerja sama antara individu dan institusi. Semua orang di dalam wilayah negara harus menerima keadilan secara sosial, politik, dan ekonomi dengan rata. Studi sosiologis tentang keadilan terutama berkaitan dengan penerapan keadilan dan sistem keadilan di dalam lingkungan sosial. Berbagai aspek sosial, politik, dan teknologi memiliki dampak yang penting terhadap bagaimana keadilan dicapai dalam praktik.

Pada dasarnya, praktik keadilan dapat dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama adalah keadilan sehari-hari dan kelembagaan dimana hubungan antar pribadi dan struktur sosial berdampak pada administrasi keadilan. Yang kedua, model teoritis keadilan, ada dua bentuk luas; ini adalah interpretivisme dan konstruktivisme. Pendekatan interpretatif memperhatikan peran individu dalam penciptaan dan administrasi keadilan, sedangkan konstruktivis politik melihat esensi dari berbagai praktik keadilan dan bagaimana mereka saling terkait dalam masyarakat menuju sistem yang satu dengan yang lainnya. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang memiliki.

Keadilan adalah prinsip dasar yang mendasari sistem hukum di berbagai negara dan merupakan nilai penting dalam ajaran Islam. Keadilan juga berarti bahwa ada pengaturan yang adil dalam hubungan antara manusia dan Allah. Keadilan juga merupakan salah satu istilah yang paling sering dibahas dalam representasi Islam. Ini karena Keadilan memainkan peran penting dalam membentuk kehidupan sosial yang harmonis dan seimbang. Selanjutnya, pedoman keadilan sosial ini tidak hanya diterapkan di bidang hukum, tetapi juga dalam masyarakat dan kesejahteraan sosial di mana semua terikat oleh Al-Qur'an dan Sunnah.

2. Konsep Keadilan dalam Islam

a. Keragaman Kuasa

Islam memandang Islam sebagai konsep holistik yang berkaitan dengan hukum sosial. Berbagai bangsa dan peradaban akan memiliki interpretasi mereka sendiri tentang apa arti keadilan bagi mereka. Namun, premis dasar keadilan adalah universal dan berlaku untuk kepentingan terbaik masyarakat secara keseluruhan.

b. Keadilan Sosial dalam Islam

Islam sangat menekankan pentingnya keadilan sosial sebagai pilar utama dalam membangun kehidupan yang harmonis. Prinsip-prinsip keadilan sosial dalam Islam bertujuan untuk menghilangkan ketimpangan, mencegah konflik, serta menciptakan keamanan,

perdamaian, dan kasih sayang di antara sesama manusia. Dalam ajaran Islam, umat Muslim diperintahkan untuk senantiasa berlaku adil dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam memberikan keputusan hukum dan memperlakukan sesama manusia. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 58:


 إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا
 وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ
 نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“innallâha ya'murukum an tu'addul-amânâti ilâ ahlihâ wa idzâ hakamtum bainan-nâsi an tahkumû bil-'adl, innallâha ni'immâ ya'idhukum bih, innallâha kâna samî'am bashîrâ”

“Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”
(QS. An-Nisa: 58)

Ayat ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk berlaku adil dan menjaga amanah, karena Allah SWT senantiasa mengawasi setiap perbuatan hamba-Nya. Oleh karena itu, keadilan sosial bukan hanya menjadi harapan, tetapi juga kewajiban yang harus diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat.

c. Pelaksanaan Keadilan dalam Masyarakat Madani:

Dalam masyarakat madani, keadilan sosial dianggap penting karena hubungannya yang erat. Al-Quran bahkan menekankan hal ini. Kondisi yang menguntungkan, adil, dan seimbang sangat penting. Bagaimana Islam dianut, dan mengapa keadilan diperlukan sebagai

bagian dari kebajikan publik di dunia tanpa batas, bebas dari kekerasan, dan ruang untuk diskriminasi. Karena dalam Islam, hak-hak setiap orang harus dilindungi dan tidak ada penyalahgunaan moderasi sepanjang prinsip keadilan.

Keadilan juga melibatkan pertimbangan tanpa intervensi. Dalam arti utamanya, keadilan berarti ultimatum pada dasar ajaran di mana keadilan berdiri, dan gagasan ini telah menjadi dasar dari istilah kebebasan untuk melawan penindasan, larangan atau perlakuan tidak adil tanpa mempertimbangkan akar kebodohan yang mengarah pada penghancuran ekstrem yang tidak melindungi kebutuhan dasar manusia yang secara sosial dikenal sebagai dasar pengamatan tanpa penindasan. Adil menunjukkan hubungan yang kuat dan seterusnya berlanjut pada terbangunnya dorongan yang tersembunyi di balik gagasan "visi yang menyampaikan mekanisme yang ditanamkan dan dipasang sebelumnya dengan hiasan penghancuran yang memerlukan perhatian ekstrem untuk visi yang di bawah menuju realitas dan lebih jauh lagi tindakan yang tergores dari gagasan yang cukup untuk bertindak pada jauh meski dunia ini gema dan melakukan lebih dari itu dengan sengaja mengambil tidak hanya Pujian yang berlebihan, tinggi, karena A mengambil hati dari pokok asalnya.

Selain itu, Ada yang berpikiran pendek tentang agama, tetapi Seseorang menyelesaikan di sekitar keadilan harus diperiksa dengan hati-hati menggunakan kata-kata tentang hanya mengambil dosis yang

lebih tinggi dengan potensi yang lebih besar. Untuk menerapkan deskripsi di atas, kita perlu mengubah makna frasa dari perspektif akomodasi. Kita harus melihat frasa melalui lensa kekerasan. Untuk memastikan istirahat yang memungkinkan sirkuit "pembuatan", penempatan socaire harus dilakukan tanpa penderitaan atau bahaya yang digambarkan di atas. pengabaian yang menyebabkan tidak terduga renoblies menunjukkan peningkatan yang jelas, bahkan jika diabaikan, di mana ketidakadilan dan embe proxy gras degradasi tanpa moderasi menghentikan stripping kokain atau menghentikan satelit. Dalam pengamatan yang lebih dekat daripada berpikir menggambarkan bahwa mengabaikan yang dimodifikasi harus mengandalkan terbang di dalam mata yang menyebabkan sakit kepala tanpa menghindari tampilan posisi C kenyataan tanpa melihat tawaran *spacecraft*, batang tampilan tanpa memeriksa, mempertahankan sementara lebih A menyerang gagasan yang benar bahwa memotong di sepanjang harus infurasi dalam ekstrem di semua batang keluar di atas faset dalam apa pun.

Dengan menempatkan dasar sebagai dari gagasan besar-besaran, lebih tepatnya mencari *desiction* yang menyaring tanpa terhambat seperti tanpa menyarankan penampakan di sekitar hampir tidak berpadu perawatan tulang telanjang dari opsi yang dimaksudkan fenproof. gagasan yang membayangkan mire shamelessly tad gambar set meta teknik yang mana akil tanpa tenaga tanpa memotong menipu

kenyataan menggambarkan mengambil yang tidak setuju daripada merombak penargetan k Oleh karena itu, dari sudut pandang orang, saya bertanya-tanya mengapa urani apa yang Amerika ingin tiru tanpa mengatakan tetap tidak ada dalam kebebasan kepala undang-undang, di mana dia muncul sebagai pengganti radian h imposition h fr nest dan dalam masalah menyerahkan perdamaian tanpa.

Tinggalkan Jendela bernapas yang cacat tampaknya menempatkan batas di luar pengawasan selektif relim sudut kebebasan ketika bertemu keseimbangan, menyamakan isolasi manusia yang ditutupi oleh kerusakan. Penjaga bermaksud pelepasan antara tanpa batasan yang ditempatkan visi melawan tanpa orang, tanpa patah tulang negatif yang lemah di dalam, tanpa ketidaksetaraan set tadesk yang mengejutkan, atau rentang minimal sikat yang baik melayani emmits, jendela memungkinkan penegakan tanpa mengungkapkan untuk menjadi Semua pre vent menyiratkan diri bebas datang harus keraguan di atas kepala nomaden diorthe lo faagm di mana pun merusak perubahan di dalam n mereka. Dalam QS. Asy-Syura ayat 17, Allah berfirman:

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ
لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ

"allâhulladzî anzalal-kitâba bil-ḥaqqi wal mîzân, wa mâ yudrika la'allas-sâ'ata qarîb"

"Allah yang menurunkan Kitab (Al-Qur'an) dengan kebenaran dan keseimbangan (keadilan). Tahukah kamu? Bisa jadi hari kiamat itu sudah dekat." (QS. Asy-Syura: 17)

Ayat ini menegaskan bahwa Allah SWT telah menetapkan hukum-hukum yang adil dalam Al-Qur'an, sehingga manusia harus berpegang teguh pada prinsip tersebut dalam menjalani kehidupan. Keadilan bukan hanya sekadar teori, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata, baik dalam kehidupan pribadi, sosial, maupun dalam sistem pemerintahan.

d. Prinsip Keadilan dalam Al-Qur'an

Konsep keadilan dalam Islam menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Al-Qur'an memberikan panduan bahwa keadilan harus ditegakkan dengan jujur, tanpa berpihak kepada kepentingan tertentu, serta menjunjung tinggi prinsip kebenaran. Dalam QS. Al-Ma'idah ayat 8, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ
بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا
إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

"yâ ayyuhalladzîna âmanû kûnû qawwâmîna lillâhi syuhadâ'a bil-qisthi wa lâ yajrimannakum syana'ânu qaumin 'alâ allâ ta'dilû, i'dilû, huwa aqrabu lit-taqwâ wattaqullâh, innallâha khabîrum bimâ ta'malûn"

"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan karena Allah, dan menjadi saksi dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah! Karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-Ma'idah: 8)

Ayat ini menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa dipengaruhi oleh perasaan subjektif, termasuk kebencian terhadap

suatu kelompok tertentu. Keadilan yang sejati adalah keadilan yang tidak berpihak, karena hanya dengan sikap adil, manusia dapat mencapai tingkat ketakwaan yang lebih tinggi.

3. Hakikat Keadilan dalam Islam

Ibnu Mandzur menjelaskan bahwa keadilan merupakan prinsip yang harus tertanam dalam diri manusia sebagai bentuk keteguhan hati dan sikap yang lurus. Dalam pandangan Islam, keadilan adalah kebalikan dari ketidakadilan (al-jaur), yaitu sikap yang dipengaruhi oleh hawa nafsu dan kepentingan pribadi. Ibnu Mandzur juga menyebutkan bahwa keadilan dalam Islam berarti menetapkan keputusan berdasarkan kebenaran, bukan karena faktor subjektivitas atau kepentingan tertentu. (Idris, *Journal of Creative Student Research (JCSR)* Vol.1, No.4, Agustus 2023, hlm. 68).

Dengan demikian, keadilan dalam Islam bukan hanya menjadi aturan normatif yang harus diikuti, tetapi juga merupakan sifat yang melekat pada diri seorang Muslim. Allah SWT sendiri memiliki sifat Maha Adil, sehingga umat Islam diperintahkan untuk meneladani sifat ini dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip keadilan dalam Islam tidak hanya diterapkan dalam hubungan antar manusia, tetapi juga dalam hubungan dengan lingkungan, alam semesta, serta Tuhan sebagai Pencipta. Oleh karena itu, keadilan menjadi elemen utama dalam membangun masyarakat yang harmonis, sejahtera, dan diridhai oleh Allah SWT.

4. Keadilan Menurut Hadist

Keadilan dalam Islam, terutama berdasarkan hadist, merupakan konsep yang sangat penting dan mendasar. Dalam konteks ini, keadilan tidak hanya dipahami sebagai tindakan yang adil, tetapi juga sebagai prinsip yang mengatur interaksi sosial dan hukum dalam masyarakat. Keadilan dalam Islam berakar pada nilai-nilai moral yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan hadist, yang menekankan pentingnya perlakuan yang sama di hadapan hukum dan keadilan sosial. Salah satu definisi keadilan dalam Islam berasal dari kata 'adl, yang berarti adil. Keadilan dalam hukum Islam merupakan tujuan akhir dari setiap peraturan yang ada. Tanpa keadilan, hukum tidak dapat dianggap sebagai hukum yang sah (Rosida, 2023). Dalam pandangan Al-Mubarak, keadilan adalah harapan universal yang harus diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk keadilan distributif, retributif, sosial, dan politik (al-Mubarak, 2018).

Ini menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga mencakup dimensi sosial yang lebih luas. Dari perspektif filsafat hukum Islam, keadilan dapat dirumuskan dalam dua cara. Pertama, sebagai keserasian antara hak dan kewajiban, yang mencerminkan prinsip "neraca hukum" (Amin, 2015). Kedua, keadilan juga dipahami sebagai kesesuaian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum. Dalam hal ini, keadilan dianggap sebagai manifestasi dari sifat Allah yang Maha Adil, yang menegakkan keadilan di dunia ini (Amin, 2015). Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Nasution yang menyatakan bahwa keadilan adalah hasil dari

penerapan hukum yang benar dan adil (Nasution, 2017). Keadilan dalam Islam juga memiliki dimensi moral yang kuat. Menurut Alfarabi, keadilan tidak hanya berkaitan dengan penerapan hukum, tetapi juga dengan moralitas dan etika dalam masyarakat (Alfarabi, 2023). Dalam konteks ini, keadilan menjadi suatu kewajiban moral yang harus dipatuhi oleh setiap individu dalam interaksi sosial mereka.

Hal ini sejalan dengan pandangan Ramadhan yang menekankan bahwa keadilan adalah nilai fundamental yang mendasari interaksi sosial dan sistem hukum (Ramadhan, 2024). Dalam praktiknya, keadilan harus diwujudkan melalui tindakan yang konkret, baik dalam keputusan hukum maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks hukum positif, keadilan sering kali diukur melalui keadilan prosedural dan substansial. Keadilan prosedural berkaitan dengan bagaimana hukum diterapkan, sedangkan keadilan substansial berkaitan dengan hasil dari penerapan hukum tersebut (Yunanto, 2019). Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa proses hukum tidak hanya adil dalam prosedurnya, tetapi juga menghasilkan keputusan yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang diajarkan dalam Islam. Keadilan dalam Islam juga mencakup aspek gender dan sosial.

Penelitian oleh Kholis et al. menunjukkan bahwa hukum dan kebijakan sering kali tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan yang seharusnya, terutama dalam konteks gender (Kholis et al., 2017). Oleh karena itu, penting untuk terus mengevaluasi dan mereformasi hukum agar lebih mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang diajarkan dalam Islam, termasuk dalam hal perlakuan

terhadap perempuan dan kelompok rentan lainnya. Secara keseluruhan, keadilan dalam Islam, yang diambil dari ajaran hadist dan Al-Qur'an, merupakan konsep yang kompleks dan multidimensional. Keadilan tidak hanya berkaitan dengan hukum, tetapi juga dengan moralitas, etika, dan interaksi sosial. Oleh karena itu, untuk mencapai keadilan yang sejati, diperlukan komitmen dari semua pihak untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam setiap aspek kehidupan.

5. Keadilan Menurut Ulama

Keadilan merupakan konsep yang sangat penting dalam hukum Islam dan menjadi salah satu tujuan utama dari syariat. Menurut para ulama, keadilan dalam Islam tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga mencakup berbagai dimensi kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Dalam konteks ini, keadilan dapat dipahami sebagai suatu prinsip yang mengatur hubungan antar individu dan masyarakat, serta antara manusia dengan Tuhan. Pertama-tama, keadilan dalam Islam berasal dari kata 'adl, yang berarti adil. Keadilan dianggap sebagai tujuan akhir dari hukum Islam, di mana tidak ada hukum yang sah tanpa adanya keadilan (Rosida, 2023). Dalam pandangan Harun, keadilan adalah kebijakan tertinggi yang selalu ada dalam segala manifestasinya, dan merupakan salah satu tujuan setiap agama, termasuk Islam (Harun, 2013). Keadilan dalam Islam mencakup keadilan distributif, retributif, sosial, dan politik, yang semuanya bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan ketenteraman dalam masyarakat (al-Mubarak, 2018).

Dari perspektif filsafat hukum Islam, terdapat dua rumusan utama mengenai keadilan. Pertama, keadilan diartikan sebagai keserasian antara hak dan kewajiban, yang sejalan dengan prinsip "neraca hukum" (Amin, 2015). Kedua, keadilan juga dipahami sebagai kesebandingan antara kepastian hukum dan kesesuaian hukum (Amin, 2015). Dalam hal ini, keadilan tidak hanya dilihat dari segi hukum positif, tetapi juga dari segi moral dan etika yang mendasari hukum tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam memiliki dimensi yang lebih luas dan tidak terbatas pada aspek legalitas semata. Selanjutnya, keadilan dalam Islam juga berhubungan erat dengan konsep hak asasi manusia. Dalam konteks ini, hukum Islam mengajarkan perlakuan yang adil terhadap semua individu, termasuk pelaku dan korban kejahatan (Panjaitan, 2022). Keadilan harus ditegakkan oleh penguasa dan hakim, yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan haknya (Sakinah, 2023). Dalam hal ini, Al-Qur'an berulang kali menekankan pentingnya berbuat adil dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, ekonomi, dan politik (Sakinah, 2023). Keadilan juga memiliki relevansi dalam konteks modern, di mana banyak ulama berusaha untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan moral, hukum, dan sosial dalam putusan pengadilan (Rizani, 2023).

Dalam konteks ini, penegakan hukum tidak hanya berfokus pada kepastian hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan keadilan sosial dan moral (Rizani, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam tidak bersifat statis, tetapi terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan

kebutuhan masyarakat. Dalam kesimpulannya, keadilan menurut ulama dalam perspektif Islam adalah suatu konsep yang komprehensif, mencakup berbagai dimensi kehidupan. Keadilan tidak hanya merupakan tujuan hukum, tetapi juga merupakan prinsip moral yang harus diterapkan dalam setiap aspek kehidupan. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu dan pemimpin untuk menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam tindakan dan keputusan mereka, agar tercipta masyarakat yang adil dan sejahtera.

B. Keadilan Menurut Muhammadiyah

Dalam konteks keadilan menurut Muhammadiyah, penting untuk memahami bahwa organisasi ini memiliki pandangan yang khas terkait dengan prinsip-prinsip keadilan yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Muhammadiyah, sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, mengedepankan keadilan sebagai salah satu pilar dalam menjalankan aktivitas sosial dan dakwahnya. Dalam pandangan Muhammadiyah, keadilan tidak hanya dilihat dari aspek hukum, tetapi juga mencakup dimensi moral dan sosial yang lebih luas, yang mengedepankan kesejahteraan umat dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat (Sukmana et al., 2023; Amin, 2015; Ramadhan, 2024). Keadilan dalam perspektif Muhammadiyah dapat dihubungkan dengan konsep keadilan restoratif, yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Keadilan restoratif ini sejalan dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam, di mana

penyelesaian konflik tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan dan rekonsiliasi (Taqiuddin, 2024; Hasan, 2013).

Dalam hal ini, Muhammadiyah mendorong pendekatan yang lebih humanis dalam penegakan hukum, dengan menekankan pentingnya dialog dan mediasi dalam menyelesaikan sengketa, sehingga semua pihak merasa terlibat dan mendapatkan keadilan (Arief & Ambarsari, 2018; Flora, 2018). Selain itu, Muhammadiyah juga menekankan pentingnya keadilan sosial, yang mencakup distribusi sumber daya yang adil dan perlakuan yang setara bagi semua individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya. Dalam konteks ini, Muhammadiyah berupaya untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat melalui berbagai program sosial dan pendidikan (Ramadhanti, 2022; Rosida, 2023). Keadilan sosial ini sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Al-Qur'an yang menekankan perlunya menjaga keseimbangan dan keadilan dalam interaksi sosial (Ramadhan, 2024; Risal et al., 2022). Dalam implementasinya, Muhammadiyah berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan ini dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Melalui lembaga-lembaga sosial yang dimilikinya, Muhammadiyah berupaya untuk memberikan akses yang lebih baik kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu, sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang (Ardiyanti, 2022; Riski, 2023). Dengan demikian, keadilan menurut Muhammadiyah tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari.

Akhirnya, penting untuk dicatat bahwa keadilan menurut Muhammadiyah merupakan suatu konsep yang dinamis dan terus berkembang. Dalam menghadapi tantangan zaman, Muhammadiyah berkomitmen untuk terus mengkaji dan memperbaharui pemahaman tentang keadilan, agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang universal (Laksono et al., 2022; Nasution, 2014). Dengan demikian, Muhammadiyah berperan aktif dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, sesuai dengan visi dan misinya sebagai organisasi yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam.

C. Profil Buya Hamka

1. Sejarah Buya Hamka

Buya Hamka (Haji Abdul Malik Karim Amrullah) adalah salah satu tokoh besar dalam sejarah Islam di Indonesia. Ia lahir di Maninjau, Sumatera Barat, pada 16 Februari 1908. Hamka dikenal sebagai ulama, sastrawan, dan intelektual yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan pemikiran Islam di Indonesia. Sebagai seorang ulama, Hamka adalah pemimpin Muhammadiyah yang memiliki kontribusi signifikan dalam memperkenalkan ajaran Islam yang moderat dan berorientasi pada keadilan sosial.

Hamka aktif dalam berbagai kegiatan dakwah dan keagamaan, dengan fokus pada pendidikan dan pemberdayaan umat. Ia menjabat sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan juga dikenal sebagai

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada masa tertentu. Sebagai seorang intelektual, Hamka banyak menulis buku dan karya ilmiah, termasuk *Tafsir Al-Azhar* yang merupakan tafsir yang mendalam tentang Al-Qur'an dan menjadi rujukan utama dalam kajian tafsir di Indonesia.

Dalam karirnya, Hamka tidak hanya dikenal sebagai pemimpin agama, tetapi juga sebagai penulis produktif yang menulis banyak buku tentang agama, budaya, dan sosial. Salah satu karya terkenalnya adalah *Di Bawah Lindungan Ka'bah*, yang memberikan pesan moral dan keagamaan kepada masyarakat. Selain itu, ia juga memberikan banyak kontribusi dalam penulisan mengenai keadilan sosial dalam Islam yang banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadist.

Muhammad Hamka, sebagai seorang tokoh Muhammadiyah, tidak hanya berjuang di ranah agama, tetapi juga di ranah sosial dan politik. Ia mengajarkan pentingnya moralitas dalam politik dan menjaga agar kegiatan politik tidak lepas dari nilai-nilai agama. Buya Hamka juga sering menyampaikan pemikiran-pemikirannya terkait dengan keadilan sosial dalam masyarakat, yang sangat berlandaskan pada ajaran Islam yang penuh dengan kasih sayang, kesetaraan, dan kepedulian terhadap sesama.

Organisasi Muhammadiyah, yang dikenal dengan pendekatan sosial dan pendidikan, mendapat banyak pengaruh dari pemikiran Buya Hamka, terutama dalam upaya pemberdayaan umat dan pengentasan kemiskinan. Dalam konteks sejarah Indonesia, Buya Hamka menjadi

simbol pergerakan sosial yang berlandaskan pada prinsip keadilan dan moralitas yang tinggi.

Dalam banyak karyanya, Buya Hamka juga berbicara tentang pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk menciptakan umat yang cerdas dan berkeadilan, serta menekankan peran umat Islam dalam memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan bangsa Indonesia. Karya-karyanya tidak hanya berfokus pada tafsir agama, tetapi juga memberikan inspirasi bagi gerakan sosial, budaya, dan pendidikan Islam di Indonesia.

2. Prinsip-Prinsip Keadilan dalam Pemikiran Buya Hamka

Buya Hamka adalah seorang pemikir yang menekankan pentingnya keadilan sosial dalam kehidupan umat Islam. Dalam berbagai karyanya, terutama dalam Tafsir Al-Azhar, Hamka menekankan bahwa keadilan adalah salah satu prinsip dasar dalam ajaran Islam, yang mencakup keadilan sosial, ekonomi, dan politik. Menurut Hamka, Islam mengajarkan umatnya untuk berlaku adil dalam segala aspek kehidupan, baik dalam hubungan antar sesama manusia maupun dalam hubungan dengan Tuhan.

Menurut Buya Hamka, keadilan sosial dalam Islam tidak hanya terbatas pada hukum, tetapi juga mencakup pemberian hak-hak yang setara kepada semua umat manusia, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang budaya. Dalam pandangannya, keadilan adalah dasar dari kehidupan bermasyarakat yang harmonis, di mana setiap individu

memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan perlindungan hukum yang adil.

Sebagai tokoh Muhammadiyah, Buya Hamka juga sangat mendukung gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid untuk memperbaiki kondisi sosial umat Islam, dengan menekankan pentingnya moralitas dan integritas dalam kehidupan beragama. Kejujuran, kesetiaan pada ajaran Al-Qur'an dan Hadist, serta pengabdian terhadap sesama adalah nilai-nilai yang selalu ditekankan dalam ajaran Buya Hamka.

3. Struktur dan Kedudukan Organisasi dalam Pemikiran Buya Hamka

Buya Hamka sebagai seorang ulama dan intelektual, memiliki pandangan yang dalam mengenai struktur organisasi dakwah Islam. Pemikirannya mengenai kepemimpinan dalam organisasi dakwah tidak hanya terbatas pada aspek formalitas struktural, tetapi juga pada prinsip moral dan spiritual yang mendasari setiap peran dalam organisasi tersebut. Dalam pandangan Buya Hamka, kepemimpinan dakwah haruslah berpegang pada nilai-nilai keadilan, kebijaksanaan, dan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini terlihat dalam pemikiran beliau yang menekankan pentingnya organisasi dakwah yang merakyat, transparan, dan berlandaskan pada prinsip-prinsip moral Islam.

Dalam struktur organisasi Islam yang digagas oleh Buya Hamka, setiap tingkatan kepemimpinan memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan kelancaran misi dakwah dan kesejahteraan umat. Menurut Hamka, kepemimpinan dalam sebuah organisasi dakwah harus memiliki

dasar kolektivitas dan tidak boleh dikuasai oleh satu individu atau kelompok tertentu, sehingga prinsip keseimbangan dalam pengambilan keputusan sangat ditekankan. Sebagai seorang pemimpin dalam gerakan dakwah, seseorang harus memiliki integritas moral, keteladanan dalam ibadah, serta kemampuan dalam memimpin dengan hikmah.

a. Kepemimpinan dalam Organisasi Dakwah Islam

Menurut Buya Hamka, organisasi dakwah dalam Islam tidak hanya berbentuk hierarki struktural, tetapi juga menekankan pada keseimbangan dalam tanggung jawab. Dalam pandangannya, setiap tingkatan pemimpin dalam organisasi dakwah memiliki tanggung jawab sosial terhadap kemakmuran umat dan kesejahteraan masyarakat, yang tidak terbatas pada kelompok tertentu saja, melainkan mencakup seluruh lapisan masyarakat, baik dari kalangan urban maupun pedesaan. Pimpinan tingkat atas memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinasi kebijakan dakwah, sementara pimpinan tingkat bawah berperan untuk menyampaikan ajaran Islam kepada umat dengan cara yang lebih dekat dan relevan dengan kebutuhan mereka.

b. Struktur Kepemimpinan yang Berdasarkan Keadilan dan Kebijaksanaan

Bagi Buya Hamka, pemilihan pemimpin dalam organisasi dakwah harus didasarkan pada kemampuan, ketulusan, dan komitmen terhadap Islam, bukan sekadar jabatan atau kekuasaan. Dalam

organisasi dakwah Islam menurut Buya Hamka, pemimpin harus memiliki kecerdasan spiritual, kecakapan dalam memimpin, serta komitmen terhadap kesejahteraan umat. Oleh karena itu, pemilihan pemimpin seharusnya melalui proses yang transparan dan adil, mengedepankan musyawarah dan musyawarah kolektif, sehingga tidak terjadi dominasi individu yang dapat merugikan umat.

c. Organisasi Dakwah yang Berlandaskan pada Prinsip Islam

Selain itu, Buya Hamka juga menekankan bahwa organisasi dakwah harus memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk menegakkan nilai-nilai Islam dan mewujudkan keadilan sosial di masyarakat. Gerakan dakwah yang dijalankan harus bersifat komprehensif, tidak hanya berfokus pada aspek agama, tetapi juga melibatkan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi bagi umat. Prinsip keadilan sosial yang diajarkan dalam Islam, menurut Buya Hamka, adalah salah satu hal yang tidak bisa dipisahkan dalam setiap gerakan dakwah. Oleh karena itu, setiap kebijakan dakwah harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial, di mana setiap individu mendapat hak dan kesempatan yang setara.

d. Peran Organisasi dalam Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi Umat

Bagi Buya Hamka, organisasi dakwah Islam tidak hanya berperan dalam penyebaran ajaran agama, tetapi juga dalam pemberdayaan sosial dan ekonomi umat. Melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, serta pembentukan lembaga-lembaga sosial, organisasi

dakwah dapat membantu umat untuk mengurangi kesenjangan sosial dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera. Organisasi dakwah, menurut Buya Hamka, harus berperan dalam membangun fondasi moral di masyarakat, dengan tidak hanya mengutamakan aspek spiritual, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan duniawi umat Islam.

4. Organisasi Otonom dalam Pemikiran Buya Hamka

Dalam pemikiran Buya Hamka, organisasi otonom atau Ortom memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan rumah tangga dakwah secara mandiri, tetapi tetap dalam koridor tujuan persyarikatan yang lebih besar. Ortom yang berkembang dalam struktur Muhammadiyah, misalnya, memiliki kewajiban untuk menyesuaikan dengan visi dakwah Islam yang lebih luas, tetapi tetap menjaga agar setiap lembaga dan unit otonom memiliki ruang lingkup dakwah yang lebih spesifik dan relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal.

Hamka menekankan bahwa setiap Ortom yang dibentuk dalam organisasi dakwah haruslah memiliki fungsi khusus, yang berorientasi pada kebermanfaatan umat dan pengembangan dakwah secara berkesinambungan. Oleh karena itu, pengelolaan organisasi yang baik dan berkelanjutan akan membawa dampak yang positif bagi keberlangsungan dakwah Islam, dengan menyeimbangkan antara kemandirian dan keterikatan pada tujuan besar organisasi dakwah.

5. Kontribusi Buya Hamka dalam Keadilan Sosial dan Gerakan Kemanusiaan

Buya Hamka, sebagai seorang ulama dan intelektual, tidak hanya berfokus pada aspek keagamaan semata, tetapi juga memiliki kontribusi besar dalam mewujudkan keadilan sosial dan gerakan kemanusiaan di Indonesia. Dalam berbagai karyanya, Hamka menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial yang lebih luas, mencakup bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi untuk umat. Buya Hamka menilai bahwa keadilan sosial dalam Islam bukan hanya soal hak individu, tetapi juga berkaitan erat dengan tanggung jawab sosial untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera.

Dalam pemikiran Buya Hamka, keadilan sosial dan kemanusiaan merupakan bagian dari misi dakwah yang harus diterapkan oleh umat Islam di dunia nyata, bukan hanya dalam konteks ibadah. Buya Hamka mengajarkan bahwa dakwah sosial harus berlandaskan pada keadilan, persamaan, dan kesejahteraan umat, tanpa membedakan status sosial atau latar belakang ekonomi. Oleh karena itu, gerakan kemanusiaan Buya Hamka seringkali menyentuh aspek pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi ketimpangan sosial yang ada.

a. Pendidikan dan Pemberdayaan Sosial

Menurut Buya Hamka, pendidikan adalah kunci untuk mewujudkan keadilan sosial. Buya Hamka selalu mengingatkan pentingnya memberikan akses pendidikan yang setara bagi setiap

orang, tanpa memandang kelas sosial mereka. Dalam pandangan beliau, pendidikan adalah jalan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, serta untuk memberdayakan umat Islam agar lebih mampu mengatasi tantangan zaman.

b. Kesehatan dan Kepedulian Sosial

Buya Hamka juga menekankan bahwa dalam Islam, kesehatan adalah hak setiap individu yang harus diperoleh secara merata. Melalui ajaran Islam, beliau menekankan pentingnya kesejahteraan fisik dan mental umat, dan setiap tindakan sosial harus berfokus pada pemberian akses yang adil kepada fasilitas kesehatan, terutama bagi warga yang kurang mampu.

c. Gerakan Kemanusiaan dan Kepedulian Terhadap Sesama

Buya Hamka dikenal juga dengan kepeduliannya terhadap kemanusiaan, terutama dalam kondisi-kondisi darurat seperti bencana alam atau kondisi sulit lainnya. Beliau mengajarkan bahwa seorang Muslim harus menolong sesama tanpa membedakan agama atau suku, berpegang pada ajaran kasih sayang dan solidaritas sosial yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadist.

6. Kontribusi Buya Hamka dalam Keadilan Sosial

a. Pendidikan dan Intelektualisme Islam

Sebagai seorang ulama yang intelektual, Buya Hamka sangat mengedepankan pendidikan sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial. Beliau percaya bahwa pendidikan adalah hak setiap orang dan

merupakan salah satu perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan umat Islam. Dengan pendidikan, umat dapat mengatasi kemiskinan dan kebodohan, serta menjadi individu yang berkontribusi positif untuk masyarakat.

Dalam ajaran Buya Hamka, pendidikan tidak hanya terbatas pada pendidikan agama, tetapi juga harus mencakup ilmu pengetahuan umum, agar umat Islam dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Buya Hamka juga mendorong masyarakat untuk mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai agama, menjadikan umat Islam tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga bermoral tinggi.

b. Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat

Pentingnya akses terhadap layanan kesehatan juga menjadi bagian dari ajaran Buya Hamka tentang keadilan sosial. Beliau mengajarkan bahwa kesehatan merupakan hak dasar manusia yang harus dipenuhi tanpa memandang status sosial atau ekonomi. Hamka sering mengingatkan tentang pentingnya kesejahteraan fisik sebagai bagian dari kesejahteraan sosial, dengan mengedepankan konsep kesehatan yang adil bagi seluruh umat Islam.

c. Pemberdayaan Ekonomi Umat

Dalam pemikiran Buya Hamka, pemberdayaan ekonomi adalah salah satu aspek utama untuk mewujudkan keadilan sosial. Buya Hamka percaya bahwa kemiskinan dan kesenjangan ekonomi dapat

diatasi melalui pendidikan keterampilan dan pengembangan usaha di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, dalam berbagai program sosial yang beliau dukung, pemberdayaan ekonomi menjadi salah satu fokus utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

7. Gerakan Kemanusiaan Buya Hamka

a. Filantropi dan Kepedulian Sosial

Sebagai seorang tokoh agama, Buya Hamka sangat dikenal dengan gerakan filantropinya dalam membantu sesama. Ia banyak terlibat dalam program kemanusiaan yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, seperti bantuan korban bencana, pembangunan fasilitas umum, dan penyuluhan tentang keadilan sosial. Kemanusiaan bagi Buya Hamka adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar dalam konteks kebaikan dan kemaslahatan umat.

b. Teologi Al-Ma'un

Ajaran Al-Ma'un yang dipopulerkan oleh Buya Hamka menekankan pentingnya kepedulian sosial, tolong-menolong, dan berbagi dengan sesama. Ajaran ini menjadi landasan kuat dalam gerakan kemanusiaan Muhammadiyah dan organisasi sosial lainnya yang dipengaruhi oleh pemikiran Buya Hamka. Konsep ini mengajarkan bahwa setiap individu harus memberikan perhatian lebih pada kebutuhan dasar masyarakat yang membutuhkan, sebagai wujud keadilan sosial.

c. Solidaritas Sosial

Buya Hamka sangat menekankan nilai solidaritas sosial sebagai bagian dari akhlak Islam. Menurutnya, solidaritas sosial adalah inti dari keadilan sosial dalam Islam, yang mengajak masyarakat untuk saling membantu, berbagi, dan berusaha menciptakan kehidupan yang harmonis tanpa memandang perbedaan suku, agama, atau ras. Melalui solidaritas ini, umat Islam diajarkan untuk hidup dalam kerukunan dan kebersamaan.

8. Pola Pikir dan Ajaran Buya Hamka

a. Rasionalitas dan Modernitas

Dalam pemikiran Buya Hamka, rasionalitas adalah salah satu aspek penting dalam pembaharuan Islam. Beliau percaya bahwa Islam tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan modernitas. Sebagai lembaga pendidikan, Buya Hamka menekankan pentingnya integrasi antara ilmu pengetahuan dan agama, serta mengajak umat Islam untuk berpikir kritis dan terbuka terhadap perkembangan zaman.

b. Kemandirian dan Pemberdayaan

Bagi Buya Hamka, kemandirian dan pemberdayaan adalah inti dari ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk berkembang dan berkontribusi bagi masyarakat. Oleh karena itu, Buya Hamka sangat mendorong masyarakat untuk memperoleh pendidikan, mengembangkan keterampilan, dan menjadi mandiri secara ekonomi agar dapat mengurangi ketimpangan sosial.

c. Kepedulian Sosial

Dalam pandangan Buya Hamka, kepedulian sosial adalah nilai yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Solidaritas dan gotong-royong adalah nilai utama yang selalu beliau tekankan sebagai cara untuk menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, Buya Hamka berharap umat Islam dapat membangun masyarakat yang harmonis dan saling mendukung.



